

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan ( Agency Theory)**

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. Teori keagenan membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Mardiasmon (2004) menjelaskan bahwa tanggung jawab publik adalah pelaksanaan tanggung jawab, penyajian, perincian, dan pengungkapan segala macam gerakan dan latihan oleh pemegang kekuasaan (*agent*) kepada pihak pemberi kekuasaan (*principal*) yang mempunyai kedudukan yang dianggap bertanggung jawab. Aset yang telah di kelola pada lembaga yang lebih tinggi tingkatnya dan tanggung jawab kepada masyarakat yang lebih luas.

Eisenhardt dalam Setyapurnama dan Nopratiwi (2020) menyatakan bahwa hipotesis jabatan bergantung pada tiga anggapan, khususnya, kecurigaan manusia (*humans assumsion*), asumsi keorganisasian (*organisation assumsi*), dan asumsi informasi (*informasion assumsi*).

Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. *Self interest*, yaitu sifat manusia yg mementingkan diri sendiri.
2. *Bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki rasionalitas.
3. *Risk aversion*, sifat manusia yang lebih memilih menghindari dari resiko.

Munculnya isu-isu tentang keagenan akan terjadi ketika pemegang kekuasaan meminta hal-hal yang berhubungan dengan keuntungannya sendiri sambil melakukan cara yang paling umum untuk merencanakan, melaksanakan, hanya memutuskan, untuk menyiapkan laporan keuangan yang masuk akal sebagai jenis

yang dibuat oleh pemegang ahli sesuai keinginan pemberi kuasa. sehingga dapat menjaga posisinya dengan tujuan agar umumnya terlihat baik dan tepat tanpa di mata para pemberi wewenang. Subaweh (Bandariy, 2011:15).

Teori keagenan juga mengungkap bahwa agen memiliki karakter akan teori keagenan juga mengungkapkan bahwa agen memiliki karakter untuk memanfaatkan peluang dan akan sering tidak menyukai risiko. Pemerintah daerah sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kedudukan untuk menunjukkan kewajibannya tidak hanya harus melalui penyampaian laporan anggaran yang adil dan lengkap, namun juga menempuh berbagai cara agar otoritas publik dapat memberikan akses kepada semua pengguna data informasi laporan keuangan. Pemerintah setempat sebagai agen akan terus berusaha untuk mencegah resiko berupa keraguan stekholder atau orang-orang pada umumnya tentang hasil kinerja pemerintah. Sejalan itu, pemerintah setempat akan berusaha untuk menunjukkan bahwa hasil dari kinerja pemerintah sampai saat ini benar-benar dan dapat dipertanggung jawabkan melalui dana daerah yg dikelola.

Agency Theory beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry (perbedaan informasi yang didapat antara satu pihak dengan pihak lainnya) antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya information asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi information asymmetry.

Berdasar Agency theory pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya information asymmetry

yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya information asymmetry maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil. Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah adanya hubungan antara prinsipal (masyarakat) dengan agen (pemerintah) dimana agen berkewajiban mempertanggungjawabkan program atau kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan guna memberikan informasi kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pemerintah daerah bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus memutuskan sistem khusus untuk menawarkan bantuan terbaik kepada masyarakat umum sebagai kepala. Kepala tentu membutuhkan hasil presentasi yang bagus dari para ahli dan salah satu pameran ini harus terlihat dari ringkasan fiskal dan bantuan yang besar, sementara bagaimana laporan keuangan dan administrasi besar bergantung pada prosedur yang dilakukan oleh otoritas publik. Dengan asumsi pameran otoritas publik itu hebat, individu akan mempercayai otoritas publik. Secara keseluruhan, keputusan sistem akan mempengaruhi kepercayaan publik sebagai kepala otoritas publik sebagai spesialis.

Semua akan cukup sering bergeser dengan jenis sub unit, pernyataan dapat disimpulkan bahwa iklim sebagai faktor kemungkinan yang mempengaruhi pelaksanaan, variabel sosial, inovasi data, sistem adalah komponen yang dibingkai dari iklim dan dampak pelaksanaan pemerintah.

## **2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**

### **2.2.1 Definisi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok

masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

(LAN RI dan BPKP, 2001). SAKIP adalah sebagai rangkaian sistematis dalam pertanggung jawaban peningkatan kinerja dan review evaluasi kerja Pemerintah Provinsi Lampung. Setiap aparatur di Pemerintah Provinsi Lampung harus tergerak memperbaiki kinerjanya dan harus bertanggung jawab atas kinerja satuan kerjanya (Ahadis, 2016).

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah mendorong Instansi fokus pada Pencapaian Sasaran. Dalam upaya Pencapaian Sasaran perlu sebuah Alat Ukur yang dinamakan Indikator Kinerja. Indikator kinerja berupa :

1. Hasil (Outcome) : Bagaimana Tingkat pencapaian Kinerja yang diharapkan Terwujud, berdasarkan Output (Keluaran) atas Kebijakan atau Program yang sudah dilaksanakan
2. Keluaran (Output) : Bagaimana Produk yang Dihasilkan secara Langsung oleh adanya Kebijakan atau Program, berdasarkan Input (Masukan) yang digunakan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Keputusan kepala LAN No. 29/2010 bahwa penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan penyempurnaan dan perlu ditetapkan peraturan mengenai pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan peraturan ditetapkan peraturan mengenai pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan peraturan menteri

negara peneri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagai penyempurnaan tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjelaskan bahwa, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

### **2.2.2 Prinsi-prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Berdasarkan Pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh kepala lembaga administrasi negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
4. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
5. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **2.2.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu tatanan instrumen dan metode pertanggung jawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan strategik
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus Akuntansi Kinerja pemerintah dimulai dari penyusunan perencanaan strategik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi misi tujuan dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahunnya. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran strategik dalam tahun yang bersangkutan serta strategik untuk mencapainya.

Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan barulah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, yaitu tatanan instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

## **2.2.4 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

### **2.3 Komitmen Organisasi**

Dalam komitmen organisasi ada beberapa definisi tentang komitmen organisasi. Seperti yang ditunjukkan oleh Sutrisno (dalam Dena Handayani dkk, 2020) menyatakan bahwa tanggung komitmen organisasi adalah dorongan yang kuat untuk menjadi bagian dalam suatu pertemuan dan kepercayaan dan pengakuan kualitas dan tujuan . Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh Robbin dan Hakim (2008) merekomendasikan bahwa tanggung jawab komitmen organisasi adalah suatu kondisi di mana seorang setuju dengan tujuan organisasi dan ingin mengikuti semua persyaratan di dalam organisasi. Komitmen organisasi adalah perilaku perwakilan yang terkait dengan kepercayaan dan pengakuan tujuan dan nilai otoritas, kemampuan untuk bekerja untuk pencapaian kepentingan otoritatif, dan ingin mengikuti posisi sebagai individu dari asosiasi.

Prestasi berwibawa tidak diimbangi dengan prestasi dalam mengawasi SDM. Tingginya tanggung jawab perwakilan ke tempat di mana organisasi tempat mereka bekerja, memutuskan presentasi yang akan dilakukan oleh asosiasi. Dalam ranah pekerjaan, tanggung jawab pekerja memiliki dampak yang vital, memang ada beberapa asosiasi yang menantang untuk memasukkan tanggung jawab sebagai syarat untuk berdiri teguh pada situasi/jabatan yang diperluas dalam iklan peluang kerja. Setiap pekerja memiliki premis dan perilaku alternatif yang bergantung pada tanggung jawab hierarkis yang dimilikinya. Perwakilan yang memiliki tanggung jawab tinggi akan melakukan upaya paling ekstrem dan dorongan kuat untuk mencapai tujuan hierarkis. Kemudian lagi, perwakilan yang memiliki tanggung jawab rendah akan melakukan upaya yang tidak ideal dalam kondisi terkendala. Robbins dan Hakim

(Handayani et al, 2020) mengurutkan tanggung jawab otoritatif menjadi tiga petunjuk terpisah, yaitu spesifik penuh rasa tanggung jawab, tanggung jawab terus-menerus, dan tanggung jawab mengatur. Tanggung jawab juga merupakan janji untuk kecocokan antara individu dan asosiasi. Alasan tanggung jawab

emosional lebih banyak untuk dicapai dengan pengalaman kerja yang dapat mengatasi masalah individu sehingga mereka merasa hebat dan siap di tempat kerja. Melanjutkan dengan tanggung jawab dan mengatur tanggung jawab lebih terkait dengan wawasan kerja langsung masa lalu. Tanggung jawab terus berkembang dari saat-saat yang memperluas biaya meninggalkan asosiasi.

Bagian dari tanggung jawab otoritatif meliputi:

- a. Komitmen afektif (*affective commitment*) Komitmen yang terjadi karena pegawai memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi karena ikatan emosional (*emotional attachment*) maupun ikatan psikologis terhadap organisasi.
- b. Komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*) yaitu komitmen yang terjadi saat pegawai tetap bertahan di dalam organisasi karena memerlukan gaji dan manfaat lainnya, maupun hal tersebut disebabkan oleh pegawai tidak berhasil mendapatkan pekerjaan lain. Dapat dikatakan juga bahwa pegawai memilih untuk tetap tinggal di organisasi karena pegawai tersebut memerlukan organisasi tersebut.
- c. Komitmen normative (*normative commitment*) yaitu komitmen yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di dalam diri pegawai. Pegawai bertahan menjadi bagian dalam organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen organisasi yaitu memerlukan hal yang memang harus dilaksanakan. Jadi, pegawai memilih tetap tinggal di dalam organisasi karena telah sadar bahwa mereka memiliki kewajiban di dalam melakukan komitmen organisasi.

Dengan komitmen organisasi ini dapat lebih memajukan penyelenggaraan pemerintahan dan mengurangi penyimpangan perilaku aneh sehingga dapat menjadi tanggung jawab yang kokoh dari kelompok-kelompok yang memiliki wewenang dan kewajiban di dalam bidang pengawasan dan evaluasi tanggung jawab penyelenggaraan organisasi pemerintahan.



## 2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi saat ini sangat penting karena banyak dari organisasi pemerintah yang telah melaksanakan sistem yang berkaitan dengan teknologi agar dapat membantu seluruh kegiatan organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi pada asosiasi pemerintahan tentu memiliki alasan alternatif dengan alasan pemanfaatan IT dalam suatu organisasi adalah untuk membantu kepentingan organisasi.

Teknologi informasi menggabungkan komputerisasi dan korespondensi untuk informasi, suara dan video (Williams dan Sawyer, (2017). Seperti yang ditunjukkan oleh Zanaria (2017), Teknologi informasi bermaksud untuk membantu organisasi dalam menyelesaikan latihan fungsional sehari-hari. Pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi dapat lebih memajukan kegiatan pemerintah dan mungkin dapat mencegah misrepresentasi dalam organisasi. Menurut Sutarman (2012) keuntungan dalam menerapkan manfaat teknologi informasi adalah kecepatan, konsistensi, presisi, dan ketergantungan.

pemerintah perlu merampingkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membuat organisasi kerangka kerja data eksekutif dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja secara terpadu dengan bekerja dengan akses antar unit kerja. estimasi penggunaan inovasi data tergantung pada hal-hal berikut: kekuatan penggunaan, penggunaan berulang, dan berbagai pemanfaatan perangkat lunak.

Unsur-unsur dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Penggunaan Komputer Menurut Hasnidar (2016), sistem informasi yang menggunakan computer yaitu suatu kegiatan dimana komputer yang dapat memproses transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan sehingga bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang mempermudah proses koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan organisasi.

- b. Penggunaan Jaringan Berdasarkan Cetak Blue Print Sistem Aplikasi e-Government (2011) yang diterbitkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3/2003

struktur kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terdiri dari:

1. Akses, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Internet dan Media Komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan public.
2. Portal, Pelayanan Publik berbentuk situs web pemerintah yang menggunakan internet sebagai penyedia layanan publik yang berjuang untuk mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan data-data yang akan menjadi informasi penting dan dokumen elektronik di seluruh OPD.
3. Organisasi sebagai wadah dalam pengelolaan dan pengolahan seluruh informasi organisasi yang akan digunakan sebagai pendukung sumber daya manusia dalam mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi serta dokumen elektronik
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana yang berbentuk perangkat keras dan lunak agar mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi serta mendukung informasi maupun infrastruktur berupa portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

Sedangkan menurut penel yang dijelaskan oleh Suyanto (2005), Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dinilai melalui pemanfaatan komponen-komponen berikut ini:

1. Perangkat Keras Komputer (Hardware), merupakan suatu sistem informasi yang terdiri dari input dan output. Hardware yang dipakai untuk alat penyimpanan file, mempersiapkan data serta terminal input maupun output.
2. Perangkat Lunak Komputer (Software), merupakan suatu perkembangan software yang digunakan agar bisa membantu pengalokasian informasi dan

data seperti sistem pengoperasian. Selain itu penggunaan software lebih baik didukung juga dengan sistem seperti berbasis computer agar dapat melengkapi keperluan pemakai informasi, seperti: e-commerce, e-banking, DSS (Decision Support System), SAP (System Application and Processing), dan lainnya.

3. Jaringan dan Komunikasi, merupakan suatu sistem yang dapat menghubungkan serta memadukan lebih dari satu titik komunikasi sehingga menjadi satu kesatuan yang bisa saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Internet adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempermudah serta menciptakan mutu hubungan dengan pengguna informasi dan antar unit organisasi. Maka untuk itu, alat-alat yang bisa mendukung dan menciptakan kemampuan jaringan terus dikembangkan untuk para pihak-pihak yang sedang dan akan bertransaksi dapat saling berkaitan dengan pesat.

Dengan menggunakan dorongan teknologi, data yang dibutuhkan oleh daerah dapat diberikan dengan cepat dan tepat, tidak hanya individu yang efektif mendapatkan data dari pemerintah pusat, mereka juga dapat secara efektif memperoleh data untuk membangun potensi yang ada di lingkungan tersebut. Tanggung jawab pelaksanaan yang besar dan besar diperlukan agar pemanfaatan teknologi informasi ini dapat berhasil.

### **2.5 Mekanisme Corporate Governance**

kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah good governance (kepemerintahan yang baik). (Wasistiono, 2003) mengemukakan bahwa tuntutan adanya good governance ini timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengontrol roda pemerintahan agar tidak salah dari tujuan jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Selanjutnya, (Purnomowati & Ismini, 2014) juga

menambahkan bahwa upaya mengikutsertakan masyarakat (stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan hanya dapat terwujud bila kehidupan demokrasi berjalan dengan baik.

Tujuan utama dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan suatu system pengendalian dan keseimbangan (*chek and balances*) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan sumber daya organisasi agar tetap memajukan terjadinya pertumbuhan perusahaan atau organisasi. Syahroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanism tata kelola organisasi secara baik, agar pengelolaan, sumber daya organisasi, secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, terbuka, akuntabilitas, dan bertanggung jawaban secara independen dan adil untuk mencapai tujuan organisasi.

Di negara-negara maju, *corporate governance* baru dilaksanakan secara menyeluruh sejak tahun 1980.. banyaknya pelaksanaan *corporate governance* menyebabkan pelaksanaan *corporate governance* tidak merupakan faktor yang berdampak secara signifikan untuk meningkatkan nilai pendapatan suatu perusahaan atau organisasi (Black, Jang, dan Kim, 2003). Di Asia, termasuk Indonesia, *corporate governance* mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda negara-negara tersebut (Indaryanto, 2004).

## **2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Ada banyak penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel yang bisa mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan tersebut dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

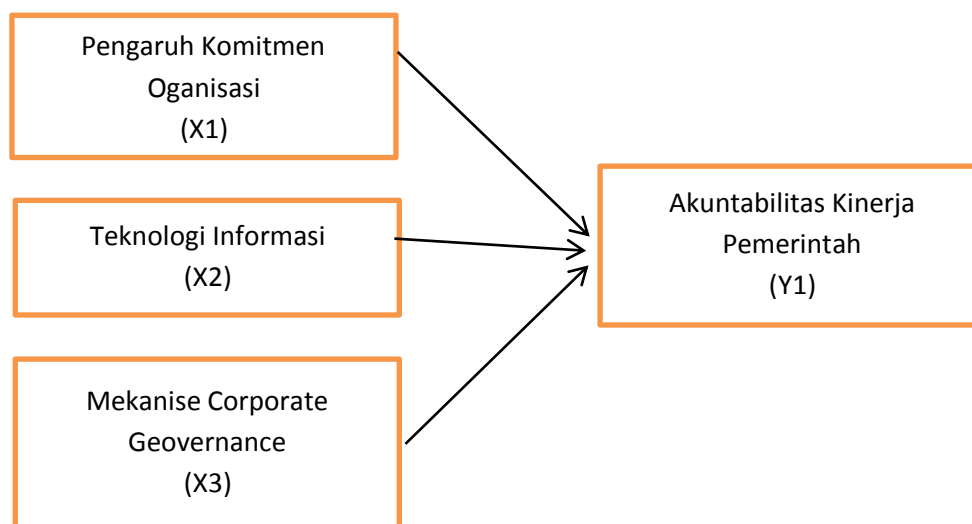
## Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul	Variabel	Hasil	Keterbatasan
Levi Savila (2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja	variabel independen yaitu Sistem pengendalian internal, Pemanfaatan teknologi informasi, Komitmen organisasi, Kompetensi aparat pemerintah dan Kepatuhan Regulasi terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah.	Sistem pengendalian internal, Pemanfaatan teknologi informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi aparat pemerintah, dan kepatuhan regulasi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. OPD yang sadar akan pentingnya pengaruh dari variabel-variabel yang jelaskan diatas maka akan melaksanakan kinerja akuntabilitasnya dengan baik dan transparan	1. Ruang lingkup dan responden yang terdapat dalam penelitian ini hanya bersumber dari OPD dinas yang ada di daerah kabupaten Bengkalis saja. 2. Dalam penenlitan ini tidak semua responden mengisi kuisisioner, hanya 54 dari 84 orang OPD pada instansi di kabupaten Bengkalis  Berdasarkan

<p>Tiara Rismawati (2019)</p>	<p>Pengaruh kopetensi aparat dana desa, komite organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa di kec. Badongan)</p>	<p>Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komite Organisasi Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi informasi dan sistem pengendalian Internal. Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Komite Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif. Sedangkan Kompetensi, Sistem Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa</p>	<p>an Uji validitas terdapat 40% instrumen yang tidak valid, sehingga indikator dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini belum mencerminkan indikator yang sesuai dengan konstruksya</p>
<p>Arif, Novita, Dialespati. (Berkala Akuntansi dan keuangan Indonesia, Vol,02 N0.02 (2017) :1-20 )</p>	<p>Pengaruh Kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)</p>	<p>Variabel Independent : Pengaruh Kompetensi dan sistem pengendalian internal. Variabel Dependent : Akuntabilitas alokasi dana desa</p>	<p>Kopetensi tidak berpengaruh sedangkan sistem pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pengelolaan alokasi dana desa</p>	<p>Penelitian ini hanya menggunakan 2 vaiabel saja, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi,serta dalam penelitian ini hanya menggunakan kuisioner saja</p>

## 2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu keharusan untuk menyelesaikan hipotesis dengan penelitian faktor-faktor yang membuat, mengatasi masalah, dan spekulasi. Mengingat masalah dan landasan hipotetis di atas, pemeriksaan membuat struktur teoritis sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Mengingat struktur yang diterapkan yang ditampilkan pada Gambar 2.1, alasan penelitian ini dapat diungkapkan untuk menganalisis apakah kerangka kerja pembukuan pemerintah dan pemahaman pembukuan secara tegas mempengaruhi perluasan tanggung jawab pelaksanaan pemerintah. Faktor bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka pembukuan pemerintah lingkungan dan pemahaman pembukuan, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab kerja.

Sejalan dengan itu, gagasan tentang faktor-faktor otonom yang memiliki hubungan dan dapat mempengaruhi variabel terikat dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP No. 71 tahun 2020 sistem akuntansi pemerintah menyediakan seperangkat prosedur yang sistematis, operator, perangkat dan perangkat untuk menyelesaikan fungsi akuntansi untuk mewujudkan operasi dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan dalam pemerintahan. Menjadi faktor lain. Lingkungan pada akhirnya, pelaporan keuangan dapat menjadi informasi.

Tanggung jawab publik adalah pengaturan data dan pengungkapan pelaksanaan dan pelaksanaan moneter pemerintah kepada individu yang diinvestasikan (Halim 2004). Dengan data dan pengungkapan ini, siapkan legislatif pusat dan lingkungan untuk memberikan data tentang latihan dan eksekusi moneter yang diharapkan dengan cara yang tepat, penting, nyaman, dapat diprediksi, dan dapat diandalkan, memberikan data dan mengungkap eksekusi moneter sehubungan dengan kebebasan, akses, pemikiran publik. , dan tanggung jawab. .

Hasil penelitian yang membantu dampak pelaksanaan kerangka tanggung jawab pemerintah terdekat terhadap tanggung jawab kerja diselesaikan oleh Lumenta, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa kerangka kerja pembukuan otoritas publik memiliki dampak kecil yang sangat besar terhadap tanggung jawab pelaksanaan.

## **2.7 Bangunan Hipotesis**

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto 1998-67)

Penerapan sistem akuntansi daerah (SAPD), pemahaman pembukuan dan pada saat yang sama persuasif terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi.

### **2.7.1 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemeintah**

Seluruh pegawai sub bagian keuangan pada satuan kerja perangkat daerah memiliki kewajiban untuk memahami sepenuhnya semua tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sehingga apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan siap dan mampu mengikuti perubahan. Secara substansi kata



komitmen erat kaitannya dengan nilai-nilai dan tujuan yang telah dicapai atau dapat dikatakan bahwa komitmen merupakan faktor penting yang digunakan untuk mencapai keberhasilan.

Salah satu strategi untuk lebih mengembangkan data para eksekutif adalah untuk membangun tingkat kontribusi bagian untuk asosiasi bagian yang lebih tinggi dalam asosiasi, salah satu pilihan adalah untuk memperluas tanggung jawab hierarkis mereka, tanggung jawab otoritatif memiliki definisi sesuatu di luar konsistensi dan kesetiaan, tetapi pada saat yang sama adalah khawatir tentang koneksi dinamis dan keinginan pekerja. Untuk membuat komitmen yang berharga untuk asosiasi. Komitmen berharga dalam mengawasi keuangan negara adalah membuat laporan moneter langsung untuk mengungkap dan memperkenalkan semua pertukaran yang terkait dengan keuangan dan semua sumber daya yang dikendalikan dan diklaim oleh legislatif terdekat dengan harapan mendapatkan penilaian yang tidak memadai (WTP).

Penelitian Terdahulu Savila (2021) menyatakan bahwa komitmen suatu organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi maka kinerja akuntabilitas pemerintah juga akan meningkat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zodia (2015), Wardhana et al. (2015), dan Febrian (2016). Komitmen organisasi dapat dilihat dari etos kerja dan loyalitas karyawan dalam menjalankan segala aktivitas. Komitmen organisasi ada jika individu dalam organisasi menyadari hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat posisi dan manfaatnya. Pencapaian tujuan organisasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota organisasi secara kolektif.

Berdasarkan uraian tersebut di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

### **2.7.2 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah**

Kerangka kerja pembukuan akuntansi pemerintah publik tidak diragukan lagi memiliki pertukaran volume yang membingungkan dan sangat besar. Dengan pesatnya perkembangan inovasi data dan peluang untuk memanfaatkannya secara luas, cenderung dimanfaatkan untuk membuka pintu terbuka yang luar biasa bagi pertemuan-pertemuan untuk membuat jatuh tempo, mengakses, dan memperlancar serta memperlancar data yang berhubungan dengan uang provinsi. secara tepat dan cepat. Dengan menggunakan inovasi data dapat mempercepat metode pengenalan laporan fiskal sehingga dapat selesai tepat waktu dan informasi lebih tepat. penanganan informasi dengan menggunakan inovasi data (PC dan organisasi) akan memberikan banyak manfaat baik dari segi ketepatan/ketepatan akibat pemanfaatannya maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multihandling.

Seperti yang dikemukakan Perdana (2018), pemanfaatan inovasi data adalah keadaan atau sikap seorang pemegang buku untuk memanfaatkan inovasi untuk menyelesaikan tanggung jawab dan mengerjakan presentasinya. Penggunaan inovasi data mencakup (penanganan informasi, penanganan data, kerangka kerja eksekutif dan proses kerja secara elektronik. Penggunaan inovasi data merupakan keuntungan yang diharapkan oleh klien inovasi data dalam menjalankan kewajibannya.

Penggunaan inovasi data akan sangat membantu mempercepat cara paling umum dalam mengawasi pertukaran informasi dan memperkenalkan ringkasan fiskal dan membatasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas administrasi moneter akan dicatat lebih metodis (Ariesta, 2013).

Eksplorasi masa lalu Savila (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan inovasi data berpengaruh positif terhadap tanggung jawab pelaksanaan pemerintah. Dengan menggunakan kemajuan dalam inovasi, data yang dibutuhkan oleh daerah dapat diberikan dengan cepat dan tepat, tidak hanya individu yang efektif mendapatkan

data dari pemerintah pusat, mereka juga dapat secara efektif memperoleh data untuk memperluas kemungkinan yang ada di lingkungan tersebut. Tanggung jawab pelaksanaan yang besar dan besar diperlukan agar pemanfaatan inovasi data ini dapat berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut :

## **H2: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

### **2.7.3 Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah**

kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah good governance (kepemerintahan yang baik). (Wasistiono, 2003) mengemukakan bahwa tuntutan adanya good governance ini timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengontrol roda pemerintahan agar tidak salah dari tujuan jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Selanjutnya, (Purnomowati & Ismini, 2014) juga menambahkan bahwa upaya mengikutsertakan masyarakat (stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan hanya dapat terwujud bila kehidupan demokrasi berjalan dengan baik.

Tujuan utama dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan suatu system pengendalian dan keseimbangan (*chek and balances*) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan sumber daya organisasi agar tetap memajukan terjadinya pertumbuhan perusahaan atau organisasi. Syahroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanism tata kelola organisasi secara baik, agar pengelolaan, sumber daya organisasi, secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, terbuka, akuntabilitas, dan bertanggung jawaban secara independen dan adil untuk mencapai tujuan organisasi.

Di negara-negara maju, *corporate governance* baru dilaksanakan secara menyeluruh sejak tahun 1980.. banyaknya pelaksanaan *corporate governance* menyebabkan pelaksanaan *corporate governance* tidak merupakan faktor yang berdampak secara signifikan untuk meningkatkan nilai pendapatan suatu perusahaan atau organisasi (Black, Jang, dan Kim, 2003). Di Asia, termasuk Indonesia, *corporate governance* mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda negara-negara tersebut (Indaryanto, 2004).

Dengan adanya Mekanisme *corporate governance* dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah maka terciptanya system pengendalian dan keseimbangan (*chek and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumberdaya perusahaan atau organisasi dan mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan atau organisasi. Dengan demikian tercapainya *Corporate Governance* dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dibuktikan dengan penyusunan anggaran yang baik dan profesional yang ditentukan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi demi mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H3: Mekanisme Corporate Governance Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**